

Judul : Cegah kasus BD anak, komisi VII sarankan hadirkan psikolog
Tanggal : Minggu, 08 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Kasus BD Anak Komisi VII Sarankan Hadirkan Psikolog

ANGGOTA Komisi VIII DPR Surahman Hidayat menyoroti maraknya kasus bunuh diri (BD) anak di beberapa daerah dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena itu merupakan alarm keras bagi bangsa dan menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak nasional masih rapuh dan perlu evaluasi menyeluruh.

Berdasarkan data KPAI tahun 2026, sepanjang periode 2023–2026 tercatat 120 kasus bunuh diri anak. Angka itu mencerminkan persoalan kompleks yang dipicu berbagai faktor. Mulai dari kemiskinan, perundungan, depresi, pola asuh minim empati, hingga paparan lingkungan digital yang tidak sehat.

Surahman menilai, data itu menunjukkan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak dan respons kesehatan mental nasional. "Negara tidak boleh menganggap angka itu sebagai statistik semata, melainkan peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan," ujarnya, Jumat (6/3/2026).

Surahman menilai, minimnya deteksi dini kesehatan mental anak, lemahnya komunikasi dalam keluarga, serta terbatasnya layanan konseling di sekolah menjadi faktor utama yang membuat anak rentan menghadapi tekanan hidup. Kondisi itu memperbesar risiko

depresi dan keputusan.

Anak, sambungnya, adalah amanah yang harus dijaga bersama oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Kehidupan mereka tidak boleh dibiarkan hancur akibat tekanan hidup, perundungan, maupun lemahnya perhatian orang tua dan negara terhadap kesehatan mental mereka.

Karena itu, Surahman mendesak Pemerintah memperkuat layanan konseling dan kehadiran psikolog di sekolah. "Saya juga mendorong pembukaan layanan konseling daring bagi anak serta pelibatan guru dan orang tua dalam upaya deteksi dini kesehatan mental," tuturnya.

Selanjutnya, kata dia, Pemerintah perlu memperkuat deteksi dini kesehatan mental anak. Langkah itu bisa dilakukan dengan program kerja sama antara sekolah dan puskesmas. Perlindungan anak harus hadir secara nyata agar generasi muda tumbuh dengan harapan, bukan keputusan.

Surahman juga mengingatkan Pemerintah untuk meningkatkan akses bantuan sosial dan perlindungan bagi keluarga miskin. Itu agar anak tidak terbebani tekanan ekonomi yang semakin besar. Bantuan sosial diharapkan bisa diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin tanpa diskriminasi identitas. ■ PYB